

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo
- Bambang Sunggono, (2005), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers
- Bambang Waluyo, (2012), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Boer Mauna, (2005), *Hukum Internasional (Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni
- Chairul Anwar, 1995, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dalam Hukum Internasional*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- Chomariyah, (2014), *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan*, Malang; Penerbit Setara Press
- Didik Muhamad Sodik, (2014), *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama
- Djoko Subagyo, (2013), *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Pt. Rineka Citra
- Frans E.Likadja, (1987), *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Penerbit Bina Cipta
- Huala adolf, (2004), *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- J.G. Starke, (1989), *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Magdariza dan Ferdi, (2012), *pengantar hukum laut*, Andalas University Press, Padang,
- Marhaeni Ria Siombo, (2010), *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama
- Mochtar Kusumaatmadja, (1982), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit Bina Cipta

- _____, (1978), *Bunga Rampai Hukum laut Internasional*, Penerbit Bin
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes., (2002)., *Pengantar Hukum Internasional*., Jakarta : Penerbit P.T. Alumni Bandung
- Munadjat Danusaputro, (1982), *Wawasan Nusantara Dalam Hukum Laut Internasional*, Bandung: Penerbit Alumni
- Narsif, (2003), *Modul Hukum Laut Indonesia*, Padang : Uniersitas Andalas
- P. Joko Subagyo, (2002), *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta
- Safrinaldi, (2009), *Hukum Laut Internasional*, Pekanbaru : Penerbit UIR Press
- Sefriani, (2014), *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers
- Zainudin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

- Undang-Undang Dasar 1945
- United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*
- The 1995 FAO Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*
- Internasional Plan Of Action Deter, Prevent And Eliminate Illegal, Unrepported And Unregulated Fishing (IPOA-IUU) Tahun 2001*
- Model Scheme On Port State Measures To Combat Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (FAO Model Scheme) Tahun 2005*
- Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (PSMA) Tahun 2009*
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* (persetujuan tentang negara pelabuhan untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur)

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.58/MEN/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* 2012-2016.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Artikel, Jurnal, Majalah dan Hasil Penelitian

Admadja M, *Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Kepulauan*, disampaikan pada peringatan Sarasehan Syukuran Makasar Serui (SSMS96) di Ujung Pandang, 30 Juli 1996, dalam rangka mengenang 50 tahun pembuangan ketujuh tokoh pergerakan kebangsaan Makasar ke Serui, Yapen, Irian Jaya.

Annisa winatasia, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiaberdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Padang, Universitas Andalas

Artikel Kepabeanan Dan Cukai dari Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan from <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

Dewan Kelautan Indonesia, (2011), *Satukan NKRI Dengan Mewujudkan Negara Maritim Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur*, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Jakarta

Dr. Dina sunyowati, *dampak negatif IUU fishing di Indonesia*, www.fh.unair.ac.id Universitas Airlangga.

Website

Arifin Asydhad, *Ratifikasi PSMA, Indonesia Semakin Serius Perangi Illegal Fishing*, <http://m.detik.com/finance/ekonomi-bisnis/3251627>,

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, <http://www.djpsdkp.kkp.go.id>,

Fajar pratama, *our ocean conference dibuka : sudah saatnya dunia perhatikan ekosistem laut*, <http://m.detik.com/news/berita/d-3299153/our-ocean-conference-dibuka-sudah-saatnya-dunia-perhatikan-ekosistem-lauy>

Ika Akbarwati, *Pencurian Ikan Di Laut NKRI Sudah Seperti Kanker Stadium Akhir*, <http://www.selasar.com/ekonomi/pencurian-ikan-di-laut-nkri-sudah-seperti-kanker-stadium-akhir>

Mau Jadi Poros Maritim Dunia, Ini Yang Harus Dilakukan Indonesia, <http://news.liputan6.com/bisnis/read/2647429/mau-jadi-poros-maritim-dunia-ini-yang-harus-dilakukan-indonesia>,

Pendapat Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang negara maritime, <http://news.liputan6.com/read/418295/inilah-perbedaan-negara-maritim-dan-kepulauan>,

Pusat Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Kemeterian Kelautan Dan Perikanan, <http://www.pusluh.kkp.go.id>

Ririn ambarwati, *membangun kelautan untuk mengembalikan kejayaan sebagai negaramaritim*, <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html>,

Rizky Noor Alam, *Empat Syarat Untuk Wujudkan Negara Maritim Besar*, <http://m.metrotvnews.com/read/2014/08/14/277678/empat-syarat-wujudkan-negara-maritim-besar>,

RI Rugi Rp 100 T Per Tahun Akibat Pemancingan Illegal, <http://m.beritasatu.com/ekonomi/178619/ri-rugi-100-t-per-tahun-akibat-pemancingan-ilegal.html>,

